



Sejarah Berdiri Central Komite Khilafah di Hindia Timur (Studi Analisis Surat Kabar 1924 - 1926)

Luthfi Anwari¹

¹ Student Rihlah Indonesia, Bandung, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 15-01-2026

Revised 19-02-2026

Accepted 19-03-2026

Published 16-04-2026

Keywords:

The Caliphate
Committee,
Newspaper,
Islamic Flag,
Indonesia,
Dutch East Indies

Correspondence:

luthfianwari@gmail.com

Abstract

This Al-Islam Congress was a political reaction by Muslims in the Dutch East Indies to the abolition of the global Islamic political institution known as the Caliphate, as well as the ousting of Caliph Abdul Majid II by Mustafa Kemal Pasha—with British assistance—on March 3, 1924. The purpose of this study is to analyze the history of the establishment of the Central Committee of the Caliphate in the Dutch East Indies (A Newspaper Analysis Study, 1924–1926). Employing a qualitative approach and historical research methods (heuristics, criticism, interpretation, and historiography), as well as an interdisciplinary approach, this study addresses a gap in the literature by combining historical, political, and social perspectives. The findings reveal that in mid-1924, several figures from the Arab community in Batavia and Surabaya received an invitation to the Caliphate Congress in Cairo sent by the scholars of Al-Azhar. Tjokroaminoto responded by organizing a meeting held on Saturday and Sunday, October 4–5, 1924, at the Madrasah Tarbiyatul Aitam building in Genteng, Surabaya. The invitation to the meeting was disseminated to all scholars and community leaders through the newspapers of the Islamic movement. Disagreements marked the proceedings of the meeting, until Wondo Soedirjo eventually suspended the session briefly. Once the atmosphere had calmed, the participants agreed to first establish a committee as a platform for their struggle. The meeting, held at Madrasah Tarbiyatul Aitam in Surabaya, resulted in the formation of the first organization in the East Indies dedicated to reestablishing the Caliphate. Attendees representing various Islamic organizations and several regional associations agreed to name this merged organization the Centraal Comite Chilaafat Hindia Timoer. The newspaper Soeara Perdamaian published the khittah, or guiding principles, of this movement.

Kongres Al-Islam ini adalah reaksi politik dari umat Islam di Hindia Belanda atas penghapusan institusi politik Islam global yang disebut Khilafah, serta pengusiran Khalifah Abdul Majid II oleh Mustafa Kemal Pasha yang dibantu oleh Inggris pada 3 Maret 1924. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Sejarah Berdiri Central Komite Khilafah di Hindia Timur (Studi Analisis Surat Kabar 1924 - 1926). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian sejarah (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi), serta pendekatan interdisipliner, studi ini menjawab kekosongan literatur dengan menggabungkan perspektif sejarah, politik, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan, Pertengahan 1924, beberapa tokoh dari komunitas Arab di Batavia dan Surabaya menerima undangan Kongres Khilafah di Kairo yang dikirim para ulama al-Azhar. Hal tersebut direspon Tjokroaminoto dalam bentuk rapat yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad,



tanggal 4-5 Oktober 1924. Berlokasi di Gedung Madrasah Tarbiyatul Aitam, Genteng, Surabaya. Undangan pertemuan tersebut diinformasikan kepada seluruh ulama dan tokoh-tokoh umat lewat medium surat kabar pergerakan Islam. Silang pendapat menghiasi kondisi rapat yang tengah berlangsung, hingga pada akhirnya Wondo Soedirjo menghentikan rapat sejenak. Setelah suasana rapat kembali kondusif, para peserta rapat bersepakat mendirikan komite terlebih dahulu sebagai wadah perjuangan. Hasil rapat yang diadakan di Madrasah Tarbiyatul Aitam, Surabaya ini membuahkan pembentukan suatu organisasi pertama di Hindia Timur yang tujuannya fokus untuk menegakkan kembali Khilafah. Para hadirin dari berbagai perwakilan organisasi Islam dan beberapa paguyuban daerah sepakat menamai organisasi fusi ini sebagai Centraal Comite Chilaafat Hindia Timoer. Koran Soeara Perdamaian memuat khittah atau pedoman gerakan ini.

A. PENDAHULUAN

Kongres al-Islam Luar Biasa di Bandung atau Kongres al-Islam V merupakan kelanjutan dari serangkaian Kongres al-Islam yang diprakarsai oleh Sarekat Islam dan segenap organisasi Islam lainnya di Hindia Belanda. Sebelumnya Kongres ini telah dihelat di beberapa kota di Pulau Jawa. Kongres ini adalah reaksi politik dari umat Islam di Hindia Belanda atas penghapusan institusi politik Islam global yang disebut Khilafah, serta pengusiran Khalifah Abdul Majid II oleh Mustafa Kemal Pasha yang dibantu oleh Inggris pada 3 Maret 1924 (Zallum, 2011: 189).

Peristiwa tersebut sontak mengguncang seluruh dunia Islam, menjadi sebuah malapetaka besar yang belum pernah terbayang sama sekali sebelumnya (Suminto, 1985: 83).



Gambar 1. Foto Istana Dolmabahçe di Istanbul yang dimuat dalam koran *Sin Po*: “Astana dari Soeltan dan Kalif di Constantinopel.” (*Sin Po Wekelyksche-Editie*, 29 Maret 1924).

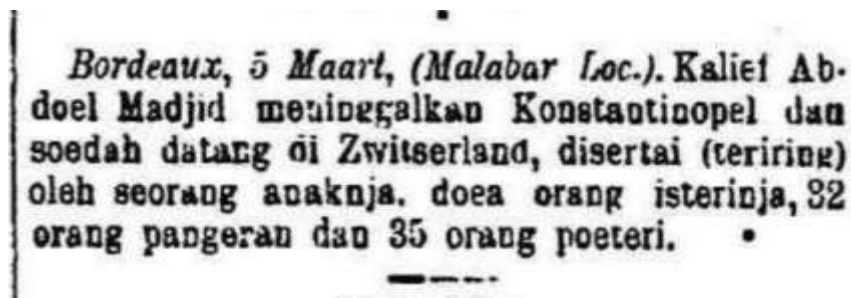
Informasi berkenaan dengan penghapusan Khilafah dan pengusiran Khalifah Abdul Majid II seketika menghiasi kolom-kolom surat kabar dalam dan luar negeri termasuk surat kabar yang terbit di Hindia-Timur. Surat kabar *Het Nieuws van den*

Dag menggambarkan suasana sidang yang panas dan perselisihan yang sengit antar-anggota Majelis Nasional di Ankara:

Mustafa Kemal menjelaskantentang perlunya membersihkan agama dari pengaruh politik dengan menggunakan sistem pendidikan dan memurnikan peradilan.

[*Mustapha Kemal wijdde uit over de noodzakelijkheid om den godsdienst te zuiveren van politieke invloeden door het usificeeren van het onderwijs-systeem en het zuiveren van de rechtspraak*] (*Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, "De Afschaffing van het Khalifaat", 5 Maret 1924).

Tak hanya koran berbahasa Belanda, surat kabar yang dikelola Boedi Oetomo cabang Surakarta, *Darmo Kondo*, menyadur surat kabar *Malabar Loc* dari Bordeaux tanggal 5 Maret. Informasi dalam kolom kabar kawat tersebut memuat berita internasional, di antaranya tentang pengusiran Khalifah beserta keluarganya:



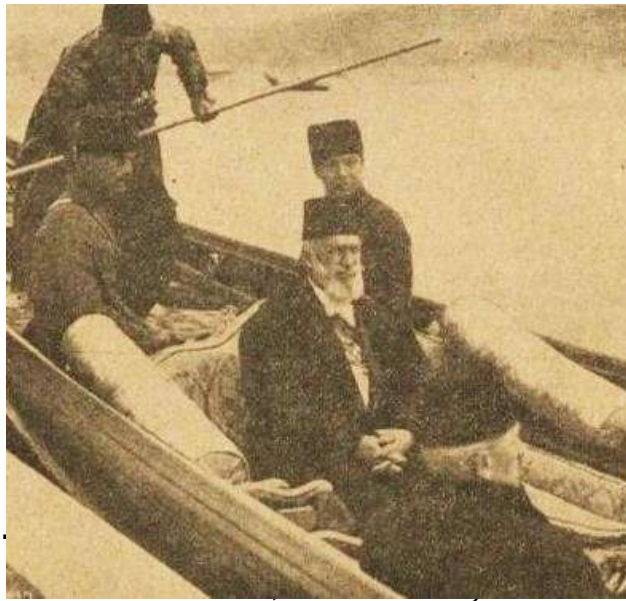
Bordeaux, 5 Maart, (Malabar Loc.). Kalief Abdoel Madjid meninggalkan Konstantinopel dan soedah datang di Zwitserland, disertai (teriring) oleh seorang anaknja, doea orang isterinja, 32 orang pangeran dan 35 orang poeteri.

Gambar 2. Surat Kabar Malabar Loc dari Bordeaux tanggal 5 Maret 1924

Kalief Abdul Majid meninggalkan Konstantinopel dan sudah datang di Switzerland, disertai (teriring) oleh seorang anaknya, dua orang istrinya, 32 orang pangeran, dan 35 orang putri (*Darmo Kondo*, "Kalief Diindarkan", 8 Maret 1924).

Tak mau ketinggalan, surat kabar yang diterbitkan Peranakan Cina di Batavia, *Sin Po*, juga turut mengabarkan berita besar ini. Mengingat pentingnya posisi Khalifah (an-Nabhani, 1997: 39) bagi segenap kaum Muslimin, *Sin Po* menyebut Khalifah yang berkedudukan di Konstantinopel bukan hanya untuk kaum Muslimin di Turki, namun juga untuk seluruh kaum Muslimin seantero dunia:

Sudah lebih dua belas abad Kalif (Khalifah) ada sebagai raja agama Islam yang mewakilin Nabi Mohamad. Boleh dibilang ada satu keberuntungan bagi Turki bahwa Kalif (Khalifah) sudah mengambil kedudukan di Turki dan menjadi juga sultan di itu negeri. Adalah lantaran ini maka Turki dapat kedudukan pemimpin dari semua negeri-negeri Muslimim (*Sin Po Wekelyksche-Editie*, "Kalifaat boekan boeat Turkije sadja", 22 Maret 1924).



Gambar 3. ... r: *Sin Po wekelijksche*

Kerangan koran *Sin Po* untuk gambar ini:

“Khalif (kepala igama Islam), selagi menjebrang selat Bosporus: officier jang ikoet padanja ada dari pamerentah Toerki di Angora: pada tanggal 4 Maart jang baroe liwat pamerentah Toerki telah poetoessin, djabatan Khalif aken dihapoesken, satoe hal jang penting boeat kaoem Moslimmin.”

Pertengahan 1924, beberapa tokoh dari komunitas Arab di Batavia dan Surabaya menerima undangan Kongres Khilafah di Kairo yang dikirim para ulama al-Azhar. Beberapa penerima kemudian mendekati Tjokroaminoto dan mengusulkan untuk mengirimkan suatu delegasi dari Hindia Belanda. Hal tersebut direspon Tjokroaminoto dalam bentuk rapat yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad, tanggal 4-5 Oktober 1924. Berlokasi di Gedung Madrasah Tarbiyatul Aitam, Genteng, Surabaya.

Undangan pertemuan tersebut diinformasikan kepada seluruh ulama dan tokoh-tokoh umat lewat medium surat kabar pergerakan Islam. Di antaranya adalah *Sri- Djojobojo*, surat kabar milik Sarekat Islam cabang Kediri. Di edisi 3 Oktober 1924, undangan tersebut disiarkan dengan judul *Pembangoen Chilaafat Comlte Soerabaja*.

Informasi berkenaan dengan para peserta yang ikut *combinatie vergadering* (pertemuan campuran) pada 4-5 Oktober sesuai undangan di atas dimuat dalam surat kabar *Sri Djojobojo* yang terbit beberapa pekan setelahnya, edisi 20 Oktober dan edisi 24 Oktober 1924. Bukan hanya ihwal peserta yang hadir, dua edisi *Sri Djobojo* tersebut bahkan juga memuat notulensi lengkap *vergadering* atau rapat yang

berlangsung, sebagaimana yang nanti akan kita lihat. Pertemuan yang digagas panitia Pembangun Khilafah Komite (*Pembangoen Chilaafat Comite*) tersebut dihadiri ± 100 orang ulama dan kaum pergerakan Islam. Mereka terdiri dari wakil-wakil perhimpunan: Central Sarekat Islam, Sarekat Islam Surabaya, Sarekat Islam Babat, Sarekat Islam Bojonegoro, Sarekat Islam Maron, Sarekat Islam Paiton, Hoofdbestuur Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah Surabaya, Paguyuban Pasundan Surabaya, Tashiwirul Afkar Surabaya, Al-Irsyad Surabaya, Al-Irsyad Betawi, Hadramaut School Surabaya, Attahdzibiyah Surabaya, Wathoniyah Surabaya, Mardi Utomo Surabaya, Tarbiyatul Aitam Surabaya, Nationaal Madoera Congres di Surabaya, Madoerezenbond Surabaya, Ta'mirul Masjid Surabaya, Fakir Ponds Surabaya, Nahdlatul Wathan Surabaya, Khairiyah Surabaya, Taman Kamulyaan Surabaya, Egypte School Surabaya (*Sri Djojobojo*, "Pergerakan Chilaafat di Hindia Timoer", 20 Oktober 1924).



memberikan notulensi lengkap *vergadering* (rapat) soal Khilafah di Surabaya, Oktober 1924. (Sumber: Repro Luthfi Anwari)

Selain perwakilan dari sekian organisasi Islam, rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kolonial Belanda. Adalah Emile Gobee, pejabat dari *Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor Penasihat Urusan Pribumi) (Suminto, 99-114) yang diutus Pemerintah Kolonial untuk mengawasi jalannya rapat di Surabaya. Gobee sendiri adalah *adviseur* (penasihat) Belanda tentang urusan Islam, Arab, dan pribumi; jabatan yang diwarisi dan diinisiasi dari Snouck Hurgronje. Pihak lain yang menghadiri rapat adalah perwakilan dari pemerintah daerah setempat: seorang Asisten Wedana *Politie* dan seorang Mantri *Politie Rechercheur*.

Vergadering (rapat) yang di mulai pada hari Sabtu, 4 Oktober 1924, pukul 20.30 malam dibuka oleh Wondo Soedirjo, ketua Pembangun Khilafah Komite. Selaku pimpinan rapat, Wondo Soedirjo mengucapkan terima kasih dan meminta kepada

semua tamu undangan untuk membaca surat al-Fatihah demi memulai acara. Kemudian beliau mengimbuhkan sesuatu yang menjadi latar belakang dihelatnya pertemuan tersebut:

Karena selama kurang lebih 500 tahun anak Hindia memeluk Agama Islam, maka di dalam riwayat belum pernah ada kejadian merembuk hal Khilafah semacam ini (*Sri Djojobojo*, “Pergerakan Chilaafat di Hindia Timoer”, 20 Oktober 1924).

Pertemuan ini diadakan secara mendadak karena Kongres Khilafah (*Mu'tamar al-Khilafah*) akan diadakan di Kairo pada bulan Maret 1925, hanya tinggal beberapa bulan lagi sejak mereka berkumpul sekarang di Oktober 1924. Karena Wondo Soedirjo memahami pentingnya mengadakan rapat tersebut, maka ia meminta kepada para hadirin untuk membahas “tentang perlu atau tidaknya umat Islam Hindia campur perkara ini.”

Setelah Wondo Soedirjo selesai, Kyai Haji Mas Mansoer dan Tjokroaminoto diminta menyampaikan *verslag vergadering* (laporan rapat) mengenai pertemuan yang diadakan di Kairo pada bulan Maret 1924 sebelumnya (*Keputusan Hay'ah Kibar al-Ulama*) menggunakan bahasa Jawa dan Melayu dengan maksud agar mudah dimengerti bagi para peserta yang hadir.

Sebagaimana yang termuat dalam undangan rapat pada poin pertama (*Hal dunia Islam dengan Khilafahnya*), Sayyid Mohammad bin Hasjim diminta untuk menerangkan bagian tarikh atau sejarah Khilafah. Sayyid Mohammad bin Hasjim menguraikan dengan singkat tentang sejarah Khilafah sesudah Rasulullah ﷺ wafat. Kemudian menerangkan tentang riwayat para Khulafa' Rasyidin juga khalifah-khalifah selanjutnya.

Setelah penjelasan singkat tentang sejarah Khilafah oleh Sayyid Mohammad bin Hasjim, Tjokroaminoto kembali menerangkan kewajiban umat Islam mengadakan Khilafah dan keadaan umat Islam pada masa ini, yang masih merupakan pembahasan poin pertama dalam surat undangan. Menurut Tjokroaminoto:

Khalifah harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjaga keperluan agama dan duniawiyah. Tentang keadaan umat Islam di Hindia berlainan sekali halnya, karena di bawah pemerintahnya lain kerajaan. Jadi Khalifah yang akan diadakan, akan membawa keuntungan bagi umat Islam Hindia tentang hal ihwal agama belaka. Seperti adanya sekarang apabila umat Islam Hindia berselisihan perkara Agama, lantas minta keadilan kepada orang lain yang tidak ber-Agama Islam. Itulah

perbuatan yang haram. Maka itu tidak boleh tidak tentang hal Khalifah ada satu kewajiban bagi kita umat Islam turut mencampurinya.

Mendengar penjelasan dari Tjokroaminoto, para peserta rapat memberikan respon dengan tepuk tangan meriah menandakan sepakat dengan uraian tersebut (*Sri Djojobjo*, "Pergerakan Chilaafat di Hindia Timoer", 20 Oktober 1924. Perwakilan dari Sarekat Islam cabang Surabaya, R. Simoen (*Bandera Islam*, 2 April 1925) melanjutkan pembahasan rapat dengan beralih ke tema poin kedua dan ketiga sesuai surat undangan, berkisar tentang keharusan mengirim utusan umat Islam di Hindia Timur ke Kairo, dan bagaimana tatacara memilih utusan tersebut. Simoen menerangkan, bahwa "selama kita memeluk agama Islam berabad-abad belum pernah merembuk memilih Khalifah, maka itu perlu sangat kita mengirimkan utusan Kongres di Kairo." Sejurus kemudian Simoen membacakan *voorstel* (usulan)-nya:

Pertama, Menyiarkan maklumat kepada segenap umat Islam Hindia, Kedua, supaya Kongres al-Islam Hindia mengadakan persidangan luar biasa di Surabaya, Ketiga, mengadakan *candidatenlijst* (daftar kandidat utusan) dengan menentukan syarat dan sifatnya orang yang akan diutus, Keempat, meminta kepada kaum Muslimin Hindia, supaya memberi *praeadvies* (saran awal) untuk dirembuk dalam Kongres al-Islam, Kelima, berikhtiar sekuat-kuatnya guna mencari uang untuk biaya utusan (*Sri Djojobjo*, "Pergerakan Chilaafat di Hindia Timoer", 20 Oktober 1924).

Setelah Simoen mengutarakan usulnya, Haji Fakhruddin dari *Hoofdbestuur* (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah bertanya kepada para hadirin, apakah kita akan terlibat dalam permasalahan ini (Khilafah)? Seketika Wondo Soedirjo sang ketua rapat menjawab, bahwa maksud dari pertemuan ini memang bertujuan meraih kesepakatan dari peserta. Ia pun balik bertanya ke Haji Fakhruddin tentang pendapatnya sendiri.

"Kita perlu mencampuri hal Khilafah ini," jawab Haji Fakhruddin lugas. "Dan kalau tidak suka campur hal ini, boleh jadi bukan Islam."

Wondo Soedirjo lantas menoleh kepada para peserta rapat, "perlu atau tidak kita mencampuri hal ini?"

"Perlu!" Para peserta rapat kompak menjawab.

Meski mendapatkan persetujuan dari para peserta rapat, ada kalanya suasana rapat berjalan cukup alot. Kini giliran wakil dari al-Irsyad, Umar Hubeis, mengeluarkan pendapatnya:

Keperluan umat Islam harus mempunyai satu pemimpin untuk mengurus hal ihwal kita, terutama yang berhubungan dengan agama dan dunia. Al-Irsyad mufakat supaya diikhtiarkan bekerja bersama-sama dengan semua orang Islam untuk mengadakan Khalifah.

Setelah itu, Haji Fakhruddin dari Muhammadiyah kembali maju ke muka dan menyampaikan *voorstel*, yakni: Komite Khilafah didirikan lebih dulu, Berikhtiar dengan jalan propaganda guna menerangkan kewajiban umat Islam terhadap Khalifah, Berikhtiar mencari ongkos utusan, Berikhtiar mengadakan al-Islam Kongres.

Selepas Haji Fakhruddin menyampaikan usulan, ada pertanyaan dari perwakilan *Doane Bond* (Asosiasi Bea Cukai) di pelabuhan Surabaya yang turut diundang dalam rapat ini, Poerwoadikoesoemo ((*Kemadjoean Hindia*, 22 Agustus 1924). “Apakah gunanya Khalifah itu, dan bisakah kita mendapat perhatian yang cukup?” katanya.

Wondo Soedirjo menjawab, jika hal tersebut sudah dijelaskan oleh para pembicara sebelumnya. Lalu, ia bertanya perlu atau tidak mengirim utusan ke Kairo Namun, hal tersebut disangkal oleh Haji Fakhruddin yang meminta supaya komite didirikan terlebih dahulu.

Silang pendapat menghiasi kondisi rapat yang tengah berlangsung, hingga pada akhirnya Wondo Soedirjo menghentikan rapat sejenak. Setelah suasana rapat kembali kondusif, para peserta rapat bersepakat mendirikan komite terlebih dahulu sebagai wadah perjuangan. Terpilihlah *bestuur* (kepengurusan) dan *leden comite* (anggota komite) dengan Wondo Soedirjo (Ketua), Kyai Haji Abdul Wahab (Wakil Ketua), Abdul Moethalib Sangadji dan R. Simoen (Sekretaris), Syekh Mohammad Aboed Alamoedi (Bendahara). Adapun sebagai anggota di antaranya : Sayyid Idrus Al Masyhur, Kyai Haji Mas Mansoer, Haji Hassan Gipo, Mansur Yamani, Haji Noor Chasan, Haji Abdullah Hakim, Haji Abdul Mannam, Haji Brahim, Oeriep Kasansengari, Raden Achmad, Haji Machsudi, Saleh bin Achmad, Umar Hubeis, Haji Djahari.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pada paruh pertama abad ke-20, ketika penghapusan institusi politik Islam global bernama Khilafah. Padahal peristiwa ini merupakan malapetaka dahsyat nan

mengguncang dunia Islam dan terekam dalam berbagai surat kabar sezaman, baik yang terbit di Hindia Timur maupun mancanegara.

Sebenarnya literasi yang dimaksud sudah ada beberapa, seperti yang dicatat Deliar Noer dalam buku *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942* (Jakarta LP3ES, 1980) atau tulisan Martin van Bruinessen dalam jurnal *Studia Islamika*, "Muslim of The Dutch East Indies and The Caliphate Question" (Vol. 2, No. 3, 1995). Hanya saja, apa yang mereka catat baru sebatas *highlight* tanpa membahas detail berkenaan lokasi pertemuan, tokoh, serta organisasi yang terlibat dan nuansa persidangan. Sebagai *urang* Bandung, penulis merasa terdorong untuk berupaya mengisi kekosongan historiografi tersebut, dan melacak dari berbagai sumber informasi.

Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini yang digunakan sebagian besar merupakan sumber primer yang berasal dari surat kabar sezaman yang mewartakan penghapusan Khilafah, lalu ikhtiar dari umat Islam dalam mengembalikan warisan Rasulullah ﷺ yang hilang. Penulis mendapatkannya dari koleksi majalah dan surat kabar langka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, situs penyedia surat kabar berbahasa Belanda *delpher.nl* dan *khastara.perpusnas.go.id*.

Selain menggunakan sumber primer, penulis pun mengutip sumber-sumber sekunder dari buku-buku serta jurnal yang menunjang informasi nan dibutuhkan. Untuk memudahkan pembaca yang budiman, penulis menggunakan *Ejaan Yang Disempurnakan* (EYD) agar menyesuaikan dengan kondisi kekinian tanpa mengubah gaya tulisan dalam sumber aslinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Komite Khilafah

Mayoritas bersepakat mengirim utusan dan telah terpilih pengurus beserta anggota komite, silang pendapat kembali bergulir. Kini Hasan Ali Surati tampil mengutarakan pendapatnya. Ia berusaha menggambarkan kondisi terbaru di Hijaz, bahwa sebelumnya Syarif Husain mendeklarasikan diri sebagai Khalifah dan kini ia kehilangan statusnya. Lalu Hasan Ali Surati beralih menerangkan kondisi masyarakat Kairo jauh lebih maju dibandingkan masyarakat di Hindia Timur. Maka dari itu Hasan Ali Surati tidak sepekat mengirim utusan ke Kongres Kairo, sebab,

Bisa juga utusan dari Hindia dianggap sebagai lalat atau nyamuk saja. Lagi pula perkara ongkos yang begitu besar lebih baik kalau itu uang dipergunakan untuk mendirikan madrasah-madrasah dan untuk keperluan kita Islam Hindia.

Kemudian ia memberikan usulan, “supaya kita kirim *motie* (mosi, keputusan rapat) saja ke Kairo dengan perantaraan al-Islam Kongres Hindia.” Seirama dengan pendapat Hasan Ali Surati, seorang pengurus Komite al-Islam Hindia Garut mengirimkan usulan yang dibacakan

A.M Sangadji. Isi usulan tersebut menyatakan,

Tiada setuju mengirimkan utusan ke Kairo, berhubung dengan besarnya ongkos, dan *voorstel* supaya umat Islam Hindia memberi mandat kepada *student-student* Bumiputera yang lagi belajar di Kairo guna menyampaikan maksud kita dalam Kongres tersebut.

Mendengar pernyataan tersebut, Wondo Soedirjo selaku pimpinan rapat meminta pertimbangan para hadirin.

Sayyid Abdullah al-Attas, wakil dari Hadramaut School Surabaya merespon pendapat dari Hasan Ali Surati dan Komite al-Islam Hindia Garut. “Tak setuju mengirim *motie* saja atau mewakilkan kepada *student-student* di Kairo yang kita belum mengetahui kecakapannya?” balasnya.

Sayyid Abdullah al-Attas tak setuju dengan pendapat pesimis dari kedua pihak tadi. “Mesti kirim utusan, sedang perkara biaya di ikhtiarkan dan Hadramaut School sanggup menyokong,” kukuhnya percaya diri, seraya menjamin masalah ongkos yang dikhawatir- khawatiri. Mohammad Pahwal dari al-Irsyad dan Ponamon dari Sarekat Islam Maron sependapat dengan Sayyid Abdullah al-Attas. Tetap diperlukan mengirim utusan seraya membantu sekuat tenaga.

Poerwoadikoesoemo tidak setuju kirim utusan, karena berhubung dengan kemiskinan rakyat Hindia. Ia kembali menyepakati usulan Hasan Ali Surati sebelumnya: “cukup kirim *motie* saja.”

Mansur Yamani, wakil dari Attahdzibiyah menguatkan pendapatnya tentang keharusan mengirim utusan. Katanya, “keperluan agama tidak bisa dibandingkan dengan harta. Rakyat Hindia miskin, tetapi saban malam bioskop dan *Jaarmarkt* (pasar tahunan) penuh, hal ini tidak bisa diambil alasan. Agama lebih perlu dari pada harta. Islam harus dibela dengan habis-habisan, sekalipun sampai jual jas dan dasinya kalau perlu. Attahdzibiyah akan menyokong sekuat-kuat tenaganya.”

Raden Bakrie Soeraatmadja dari Paguyuban Pasundan mempertegas usulan dari Komite al-Islam Hindia Garut sebelumnya sehubungan dengan kemiskinan rakyat Hindia.

Wakil dari Nationaal Madoera Congres, Rooslan Wongsokoesoemo, memberi pertimbangan: “Tidak baiknya kalau kirim *motie* atau memberi mandat kepada *student-student* Bumiputera di Kairo, karena berhubung dengan pentingnya perkara. Jadi perlu kirim utusan yang ternyata cakap dan telah berjasa membela keperluan Rakyat Hindia.”

Sasmito, perwakilan dari Sarekat Islam Babat, menguatkan pendapat akan perlunya kirim utusan. Oeriep Kasansengari dari Wathoniyah menyambung, dengan mengungkapkan kewajiban umat Islam untuk melindungi Agamanya. “Utusan amat perlu,” tegas Oeriep. Hal ini disambung kembali oleh Abdulhalik, guru dari sekolah al-Irsyad. Abdulhalik menerangkan dengan panjang lebar keperluan Khalifah dan menegaskan mesti kirim utusan.

Sebelum memutuskan hal ini, pimpinan rapat lebih dahulu meminta kepada *Hoofdbestuur* (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah dan *Centraal* Sarekat Islam untuk mengeluarkan pendapatannya. Haji Fakhrudin yang pertama menerangkan. Menurut beliau, “utusan perlu dikirim, sekalipun dianggap nyamuk, dan orang sana biar tahu rupanya nyamuk Hindia.” Mendengar pernyataan Haji Fakhrudin, para peserta tertawa di ikuti tepuk tangan meriah. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut melanjutkan,

Islam tidak membeda-bedakan umat dan kepandaian, anak Hindia tidak akan kalah dengan anak Kairo dan lain-lain negeri. Utusan kita di sana bisa mengenalkan dirinya sebagai umat Islam di lain-lain negeri, terutama untuk mempersatukan pikiran buat mengadakan Khalifah.

Tjokroaminoto memperkuat pendapat Haji Fakhrudin,

Belum pernah kejadian di dalam riwayat yang mengadakan satu Kongres Islam sedunia, hanya baru satu kali ini. Oleh karena ini hal ada menjadi satu kewajiban umat Islam, maka utusan perlu sangat dikirim ke Kairo. Kepandaian manusia tak dapat diukur.

Tjokroaminoto percaya, banyak anak Hindia yang cakap untuk dijadikan delegasi dan tidak akan dihina sebagaimana perkataan dari Hasan Ali Surati. Ia menguatkan keputusan *Kongres Centraal Sarekat Islam* baru-baru ini, yang mana “CSI

akan membantu dengan sekuat-kuat tenaga dan budinya.” (*Sri Djojobojo*, “Pergerakan Chilaafat di Hindia Timoer (Samboengan)”, 24 Oktober 1924)

Achmad Ghonaim al-Amir, guru dari Egypte School mendukung pernyataan optimis dari Haji Fakhruddin dan Tjokroaminoto. “Utusan tidak akan disia- siakan, sebaliknya tentu dihormati oleh *Comite Chilaafat Cairo*, terutama sesama umat Islam,” kata Achmad.

Ghonaim menguatkan. “Buat dapat perhubungan di antara umat Islam sedunia, maka tidak boleh tidak umat Islam Hindia perlu kirim utusan.”

Akhirnya Wondo Soedirjo sebagai *Voorzitter* atau pimpinan rapat memutuskan menimbang hasil suara terbanyak: “Maka tidak boleh tidak mesti kirim utusan.” Sebuah keputusan yang langsung disambut para peserta dengan tepuk tangan, menunjukkan persetujuan mereka bersama.

Pukul 01.00 dini hari, *vergadering* ditutup dan ditunda sampai esok harinya.



Gambar 5. Potret Wondo Soedirjo (kiri) dan A.M. Sangadji (kanan) selaku pimpinan *Centraal Comité Chilaafat Hindia Timoer*. Dimuat dalam koran *Soera Perdamaian*, disertai dengan keterangan mengenai peranan mereka dalam pergerakan Islam (Sumber: *Soera Perdamaian*, 9-16 September 1926)

Vergadering atau rapat kembali dilanjutkan pada hari Ahad, 5 Oktober 1924. Pukul 10.00 pagi.

Wondo Soedirjo, sang pimpinan rapat melanjutkan agenda dengan memulai pembahasan berdasarkan tema poin keempat dalam surat undangan: rencana penyelenggaraan Kongres al-Islam di Surabaya pada Desember 1924 nanti.

Mengenai poin kelima, Wondo Soedirjo menyatakan cara menetapkan utusan perlu diadakan lagi dalam *vergadering* (rapat) luar biasa dari Kongres al-Islam nanti. Berhubung dengan sempitnya waktu, diusahakan Kongres tersebut dapat digelar pada Desember 1924. Sehingga di bulan Januari atau Februari 1925 utusan sudah bisa berangkat ke Kairo.

Selaku *Voorzitter*, Wondo Soedirjo kemudian membacakan usulan dari Komite Kongres al-Islam Hindia Garut. Mereka mengusulkan agar Kongres nanti dilaksanakan di kota Yogyakarta saja, sebab wilayahnya berada di tengah-tengah antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Tapi usulan tersebut langsung dibantah Wondo Soedirjo sendiri:

Karena kecuali pergerakan Khilafah ini terdiri di Surabaya, pun al-Islam Hindia sudah bersidang 2 kali di tanah Jawa Barat, jadi ini *buitengewoon* (Luar Biasa) Kongres perlu diadakan di Surabaya. Lagi pula utusan yang dari seberang bisa gampang.

Akhirnya hal itu disetujui oleh semua panitia dan peserta yang hadir, jika Kongres al-Islam Luar Biasa tetap akan digelar di Surabaya.

Kemudian, pimpinan rapat menerangkan hal biaya utusan yang akan diberangkatkan ke Kairo. Menurutnya, ongkos perjalanan pulang-pergi ke sana sekaligus akomodasi selama di Kairo paling sedikit memakan 2.000 atau 2.500 *gulden* per orang. Jadi sedikitnya tiga utusan akan memakan biaya sekitar 7.500 *gulden*.

Wondo Soedirjo bergembira ketika sebelumnya mendengar bahwa Komite *Tentara Nabi Mohammad* (TNM) (Aziz, 2011: 114-115) di Surabaya masih mempunyai uang saldo kurang lebih 3.600 *gulden*. Uang kas tersebut masih disimpan oleh Syekh Roebaja bin Thalib selaku *Peningmeester* (Bendahara) Komite TNM. Menurut keterangan salah satu dari anggota Komite Khilafah yang baru dibentuk, Syekh Roebaja bersedia untuk menyerahkan uang tersebut kepada Komite Khilafah.

Tjokroaminoto sebagai ketua Komite TNM amat setuju dan sepakat jika uang saldo TNM digunakan untuk keperluan Khilafah. Beliau mengharap supaya Komite

Khilafah meminta uang kepada Syekh Roebaja. Beberapa anggota TNM yang hadir dalam *vergadering* ini menyetujui pendapat Tjokroaminoto.

Selain membahas ihwal lokasi Kongres al-Islam Luar Biasa dan menetapkan besar biaya yang diperlukan, rapat ini juga membahas tentang calon delegasi yang hendak dimajukan ke Kairo. Nantinya mereka akan ditugaskan untuk membawa mandat dan menjadi perwakilan umat Islam dari Hindia Timur.

A.M. Sangadji menerangkan syarat-syarat orang yang akan dipilih menjadi utusan dengan leluasa. “Utusan itu haruslah yang bijaksana, cakap dan luas dalam ilmu Agama Islam dan sekurang-kurangnya bisa bahasa Arab dan Inggris,” harapnya. Tapi harapan tersebut disanggah Mansur Yamani. “Perkara bahasa tidak penting karena di sana tentu ada sedia *tolk* (jurubahasa),” sanggahnya. “Jadi berbahasa Melayu juga sudah cukup.”

Sementara itu, Simoen berpendapat supaya memilih utusan diselidiki benar-benar. “Terutama yang sudah ternyata jasanya bagi Rakyat Hindia,” tegasnya. “...dan yang kira bisa menyampaikan kita punya maksud yang akan diputus dalam Kongres al-Islam Hindia tersebut,” sambung Simoen menambahkan.

Di lain pihak, Tjokroaminoto memajukan kandidat yang ditimbangannya pantas untuk diutus ke Kairo. Beliau mengusulkan:

- Haji Agoes Salim dari Betawi,
- Dr. Soemowidigdo dari Yogyakarta
- Syekh Ahmad Soorkati al-Ansari dari Betawi.

Sayyid Abdullah al-Attas kemudian mengusulkan, agar “utusan tersebut bisa singgah di Britsch Indie (India), Angora (Ankara), Afganistan dan lain-lain negeri buat meluaskan pemandangan.” Hanya saja, pimpinan rapat menolak usulan ini karena tujuan utama delegasi ialah menyampaikan mandat ke Kongres Kairo.

Berbeda dengan Tjokroaminoto, Haji Hasan Gipo dari Taswirul Afkar memajukan kandidat Kyai Haji Abdul Wahab dan Kyai Haji Mansoer dari Surabaya. Sayyid Idrus al-Masyhur dari Hadramaut School Surabaya juga memajukan kandidat lain, yakni Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab dari Betawi.

Haji Fakhrudin mengusulkan supaya “utusan semua orang Bumiputera Hindia, karena tiap-tiap bangsa dan negeri Islam tentunya sudah sama kirim utusan.” Umar Hubeis dari al-Irsyad sedikit berbeda pendapat dengan usulan Haji Fakhrudin. Menurutnya, “tidak ada busuknya kalau utusan itu terjadi dari beberapa bangsa Islam di Hindia, karena dari percampuran tadi menunjukkan persatuan dan kerukunan.”

Usul demi usul terus bersahutan. Kali ini Sasmito mencalonkan Tjokroaminoto untuk menjadi delegasi. Hal tersebut disetujui oleh para hadirin, namun Tjokroaminoto menolak pencalonannya. Ia keberatan karena Sarekat Islam tidak akan memperkenankan ditinggal olehnya hingga berbulan-bulan.

Setelah membahas kriteria dan nama-nama calon kandidat yang hendak dimajukan, rapat ini turut menyinggung siapa sosok yang berhak memangku jabatan Khalifah. Tiba-tiba, Komite al-Islam Kongres Hindia Garut mengusulkan Mustafa Kemal Pasha untuk menjadi Khalifah!

Tentu saja usulan tersebut ditolak mentah-mentah banyak orang. Salah satunya adalah Tjokroaminoto. Beliau menyatakan, Kemal Pasha adalah orang nomor satu yang menyebabkan:

Hal ihwalnya kerajaan Turki memecat Khalifah Prins Abdul Majid dan memisahkan kekuasaan Khalifah dengan urusan negeri. Pendirian kerajaan Turki sekarang menyerahkan kekuasaan dan pekerjaan Khalifah dalam kekuasaannya *Nationale vergadering*.

Karena sebab itulah, Tjokroaminoto mengusulkan agar Komite Khilafah juga membuat maklumat. Isinya menegaskan sikap Komite Khilafah terkait Ankara yang telah menghapus Khilafah Utsmani dan mengusir Khalifah Abdul Majid II, lalu menyebarkan maklumat tersebut kepada seluruh kaum Muslim di Hindia Timur.

Sayyid Abdullah al-Attas menambahkan keterangan:

Khalifah Amir Abdul Madjid itu diangkat oleh Turki sendiri, sedang sekarang dipecat oleh *Nationale vergadering* dengan tidak mufakatnya umat Islam lain-lain negeri, hal mana hingga menggemparkan dunia Islam. Lagipula Khalifah dulu hanya menguasai urusan Agama melulu, sedang sebenarnya mesti mempunyai kekuasaan hal Agama dan dunia. Turki bermaksud tidak mau memikul sendiri keperluan Khalifah harus menjadi tanggungannya semua umat Islam. Dalam al- Qur'an menyebutkan bahwa Khalifah mesti ada. Majelis kebangsaan tiap-tiap negeri seperti di Angora perlu adanya, tetapi lain halnya dengan Khilafah.

Lalu Sayyid Abdullah al-Attas berpendapat, agar “diadakan majelis Khilafah dengan dikepalai oleh satu Presiden, dan Presiden itu yang dinamakan Khalifah sedang *lid* (anggota) majelis tersebut harus ambil wakil dari umat Islam masing-masing negeri Islam.”

Ketika Haji Fakhruddin mendapat giliran bicara, beliau mengusulkan supaya,

Kedudukan Khalifah itu di Mekkah, sebab Mekkah itu suatu negerinya orang Islam sedunia merdeka. Kalau Khalifah itu berduduk disalah satu tempat kerajaan, Turki atau Egypte umpamanya. Tidak boleh tidak Khalifah itu mesti mementingkan keperluan bangsanya sendiri dari pada bangsa lain, sekalipun sesama umat Islam. Maka itu meski pun siapa saja dipilih menjadi Khalifah harus tinggal bertempat di Mekkah.

Setelah itu, Oeriep Kasansengari dari Wathoniyah yang mendapat kesempatan tampil mengajukan ketidaksepatannya dengan usulan dari Komite al-Islam Hindia Garut terkait pencalonan Kemal Pasha menjadi kandidat Khalifah. Ia sepakat dengan usulan Haji Fakhrudin. Kyai Haji Mas Mansoer menguatkan sikapnya perhimpunan *Assilmoel'am* di Kairo (?).

Kemudian, Sayyid Idrus al-Masyhur mengusulkan, “supaya dalam maklumat disebutkan, minta kepada sekalian Imam Masjid kalau sembahyang Jumat menerangkan kewajiban umat islam mengadakan Khalifah dengan bahasa anak negeri.” Kyai Haji Mas Mansoer menambah usulan, “supaya Imam di Masjid jangan lagi memujikan Amir Abdul Majid Wahididdien dalam membaca Khotbah.”

Semua usulan-usulan tersebut akan dimuat di surat maklumat. Karena tidak ada pembahasan lagi, maka Wondo Soedirjo sang pimpinan rapat meminta derma kepada sekalian yang hadir untuk ongkos keperluan Komite Khilafah ini. Mereka berhasil mendapat 24,04 gulden. Sebelum *vergadering* ditutup, Tjokroaminoto mengucapkan “terima kasih kepada *bestuur* Attahdzibiyah yang mula-mula mempunyai *voorstel* hal ini (pengumpulan derma, peny).”

Maka pukul 12.00 siang, *vergadering* ditutup oleh pimpinan rapat dengan bacaan al-Fatihah.

Hasil rapat yang diadakan di Madrasah Tarbiyatul Aitam, Surabaya ini membuahkan pembentukan suatu organisasi pertama di Hindia Timur yang tujuannya fokus untuk menegakkan kembali Khilafah. Para hadirin dari berbagai perwakilan organisasi Islam dan beberapa paguyuban daerah sepakat menamai organisasi fusi ini sebagai *Centraal Comite Chilaafat Hindia Timoer*. Koran *Soeara Perdamaian* memuat khittah atau pedoman gerakan ini.

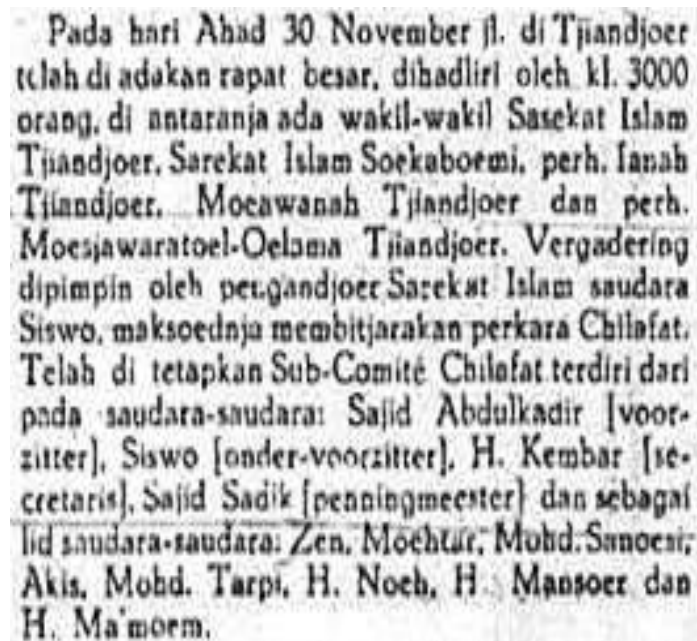
2. Sub – Komite Khilafah

Komite Khilafah yang embryo organisasinya terbentuk dari rapat akbar di Surabaya pada 4-5 Oktober 1924, merupakan wadah bagi perjuangan dalam revitalisasi lembaga Khilafah bagi umat Islam di Hindia Timur. Pembentukan Komite

Khilafah kemudian berlangsung secara cepat dan menyebar dengan luas. Eksistensi wadah pergerakan yang baru ini ditanggapi dengan sangat antusias oleh umat Islam di berbagai daerah (*Bandera Islam*, 11 Desember 1924 dan 15 Januari 1925). Banyak yang kemudian mengajukan pendirian organisasi cabang dengan nama Sub-Komite Khilafah (Sub Komite Chilaafat).

Salah satu contohnya terinfomasikan dalam surat kabar *Bandera Islam*. Koran yang diterbitkan Sarekat Islam ini, pada edisi 11 Desember 1924 mengeluarkan artikel dengan judul Pergerakan Chilafat. Isinya mewartakan tentang Sub Komite Chilafat Betawi atau Komite Khilafah cabang Batavia yang hendak membuat pertemuan dengan lokasi di Molenvliet Oost. Mereka membeberkan tujuannya dengan terang benderang, yakni untuk “membicarakan perkara Khilafah dan memilih utusan ke Surabaya (Kongres al-Islam III, peny).”

Selain Batavia, umat Islam di Cianjur juga mengadakan sebuah rapat raksasa yang dihadiri sekitar 3.000 orang untuk membahas persoalan Khilafah. Aksi ini diberitakan *Bandera Islam* pada 30 November 1924, di mana mereka melaporkan:



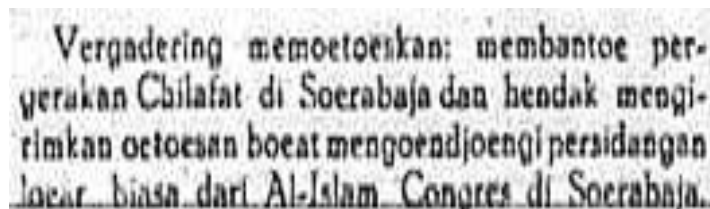
Pada hari Ahad 30 November jl. di Tjandjoer telah di adakan rapat besar, dihadiri oleh kl. 3000 orang, di antaranja ada wakil-wakil Sarekat Islam Tjandjoer, Sarekat Islam Soekaboemi, perh. Ianah Tjandjoer, Moeawanah Tjandjoer dan perh. Moesjawaratoel-Oelama Tjandjoer. Vergadering dipimpin oleh pet.gandjoer Sarekat Islam saudara Siswo, maksoednja membitjarkan perkara Chilafat. Telah di tetapkan Sub-Comité Chilafat terdiri dari pada saudara-saudara: Sajid Abdulkadir [voorzitter], Siswo [onder-voorzitter], H. Kembar [secretaris], Sajid Sadik [penningmeester] dan sebagai lid saudara-saudara: Zen, Moehur, Mohd. Samoer, Akis, Mohd. Tarpi, H. Noeh, H. Mansoer dan H. Ma'mom.

Gambar 6. Surat Kabar *Bandera Islam* 11 Desember 1924 dan 15 Januari 1925

Pada hari Ahad 30 November di Cianjur setelah diadakan rapat besar, dihadiri oleh kurang lebih 3.000 orang, di antaranya ada wakil-wakil Sarekat Islam Cianjur, Sarekat Islam Sukabumi, Perhimpunan I'anah Cianjur, Muawanah Cianjur dan Perhimpunan Moesyawaratoel Ulama Cianjur. *Vergadering* dipimpin oleh

penganjur Sarekat Islam saudara Siswo, maksudnya membicarakan perkara Khilafah (*Bandera Islam*, 11 Desember 1924 dan 15 Januari 1925).

Pertemuan besar di Cianjur yang dihadiri perwakilan dari kota-kota sekitarnya itu memutuskan untuk:



Gambar 7. Surat Kabar *Bandera Islam* 11 Desember 1924 dan 15 Januari 1925

Membantu pergerakan Khilafah di Surabaya dan hendak mengirimkan utusan buat mengunjungi persidangan luar biasa dari al-Islam Kongres di Surabaya.

3. Koran Basa Sunda 'Ngelingan' Masalah Khilafah

Masifnya pergerakan umat Islam di Cianjur sampai bisa mengumpulkan 3.000 orang untuk berembug masalah Khilafah menunjukkan, *urang* Sunda tidak mau tertinggal untuk berjuang di perkara yang penting ini. Perjuangan masyarakat Sunda dalam hal Khilafah juga ditunjukkan di dunia pers. Salah satu contohnya adalah *Sipatahoenan*, koran berbahasa Sunda yang diterbitkan Paguyuban Pasundan cabang Tasikmalaya.

Dalam edisi yang terbit pada 16 Desember 1924, surat kabar *Sipatahoenan* berusaha *ngélingan* (mengingat) *urang* Sunda untuk menghadiri Kongres al-Islam Luar Biasa di Surabaya. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti rapat yang diadakan di Madrasah Tarbiyatul Aitam pada 4-5 Oktober 1924 sebelumnya dalam membicarakan persoalan Khilafah.

Penulis artikel di *Sipatahoenan* ini, Raden Bakrie Soeraatmadja, kemudian menegaskan:

Nanti pada tanggal 24 sampai tanggal 27 Desember 1924, Komite al-Islam Kongres Hindia akan mengadakan kongres yang hendak membahas perihal Khilafah.

[*Engke dina tanggal 24 nepi ka tanggal 27 Desember 1924, Comite Al-Islam Congres Hindia baris ngayakeun Congres teh bade nyarioskeun perkawis Chilafaat*].

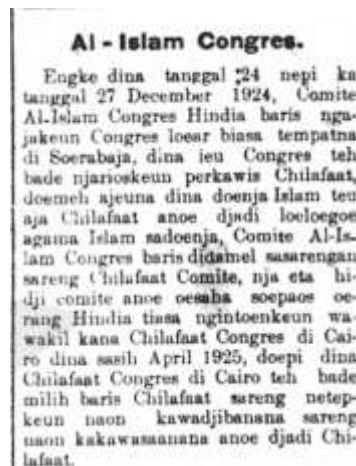
Pembahasan Khilafah dalam Kongres nanti dianggap krusial oleh Soeraatmadja. Menurut pendiri Paguyuban Pasundan cabang Surabaya tersebut, "kini

di dalam dunia Islam tak ada Khilafah yang menjadi pemimpin agama Islam sedunia” (*ayeuna dina dunia Islam teu aya Chilafaat anu jadi lulugu agama Islam sadunya*).

Selain itu, Kongres di Surabaya ini juga hendak memutuskan siapa delegasi yang hendak dikirim dalam Kongres Khilafah (*Mu'tamar al-Khilafah*) di Kairo bulan April 1925 mendatang. Di sana mereka akan menyampaikan aspirasi dan membahas kewajiban Khalifah dan seperti apa kekuasaannya. Dalam pandangan Raden Bakrie Soeraatmadja, persoalan ini adalah permasalahan yang tak kalah penting untuk segenap kaum Muslim, khususnya para ulama dan *ajengan* yang memiliki kecakapan dalam *fikrah* Islam. Soeraatmadja mendedahkan alasannya:

Dalam pandangan kami, persoalan ini tidak kalah pentingnya untuk pemeluk agama Islam, malah sangat perlu jika para ulama hadir dalam waktunya kongres (tersebut), ya begitu pun para *ajengan* yang sudah tinggi pemahamannya dalam perkara agama Islam.

[*Ku emutan jinsim kuring perkawis ieu moal kirang- kirang kepentinganana pikeun sadaya anu ngagem agama Islam, malah priogi pisan upami sadaya para Ulama sumping dina waktosna Congres, nya kitu deui para ajengan anu parantos luhung pemendakna tina perkawis agama Islam*].



Gambar 8. (Kiri) Potret Raden Bakrie Soeraatmadja, pendiri *Paguyuban Pasundan* di Surabaya; dan (kanan) ajakannya dalam koran *Sipatahoenan* kepada masyarakat Sunda untuk menghadiri Kongres al-Islam di Surabaya. (Sumber: (kiri) *bandungbergerak.com*; (kanan) *Sipatahoenan*, 16 Desember 1924).

Penulis artikel di *Sipatahoenan* tersebut sangat mementingkan peran ulama dan *ajengan* dalam hal Khilafah. Dengan posisi mereka yang ditiru dan digugu *urang* Sunda, ulama dan *ajengan* harus berpartisipasi aktif dalam memberikan keterangan serta pertimbangan. “Sebab,” pungkas Soeraatmadja, “ini bukanlah perkara sepele,

harus menjadi pikiran bersama bagi seluruh umat Islam” (*margi ieu teh sanes perkawis alit nu kedah diaremutkeun tea ku sadaya urang Islam*).

Sebagai penutup artikelnya di *Sipatahoenan*, Raden Bakrie Soeraatmadja berpesan,

Mari kita bantu bersama, perhatikan kesucian serta ketinggian agama Islam, teguhnya agama bergantung bagaimana pemeluknya.

[*Mangga geura rojongkeun ku sadaya, tembongkeun kasucianana sareng kaluhunganana agama Islam, manjengna agama teh gumantung kumaha anu ngagemna*]. (*Sipatahoenan*, “Al-Islam Congres”, 16 Desember 1924)

D. SIMPULAN

Kongres Al-Islam ini adalah reaksi politik dari umat Islam di Hindia Belanda atas penghapusan institusi politik Islam global yang disebut Khilafah, serta pengusiran Khalifah Abdul Majid II oleh Mustafa Kemal Pasha yang dibantu oleh Inggris pada 3 Maret 1924. Peristiwa tersebut sontak mengguncang seluruh dunia Islam, menjadi sebuah malapetaka besar yang belum pernah terbayang sama sekali sebelumnya. Informasi berkenaan dengan penghapusan Khilafah dan pengusiran Khalifah Abdul Majid II seketika menghiasi kolom-kolom surat kabar dalam dan luar negeri termasuk surat kabar yang terbit di Hindia-Timur.

Pertengahan 1924, beberapa tokoh dari komunitas Arab di Batavia dan Surabaya menerima undangan Kongres Khilafah di Kairo yang dikirim para ulama al-Azhar. Beberapa penerima kemudian mendekati Tjokroaminoto dan mengusulkan untuk mengirimkan suatu delegasi dari Hindia Belanda. Hal tersebut direspon Tjokroaminoto dalam bentuk rapat yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad, tanggal 4-5 Oktober 1924. Berlokasi di Gedung Madrasah Tarbiyatul Aitam, Genteng, Surabaya.

Undangan pertemuan tersebut diinformasikan kepada seluruh ulama dan tokoh-tokoh umat lewat medium surat kabar pergerakan Islam. Di antaranya adalah *Sri- Djojobojo*, surat kabar milik Sarekat Islam cabang Kediri. Di edisi 3 Oktober 1924, undangan tersebut disiarkan dengan judul *Pembangoen Chilaafat Comlte Soerabaja*. Silang pendapat menghiasi kondisi rapat yang tengah berlangsung, hingga pada akhirnya Wondo Soedirjo menghentikan rapat sejenak. Setelah suasana rapat kembali kondusif, para peserta rapat bersepakat mendirikan komite terlebih dahulu sebagai wadah perjuangan. Terpilihlah *bestuur* (kepengurusan) dan *leden comite*

(anggota komite) dengan Wondo Soedirjo (Ketua), Kyai Haji Abdul Wahab (Wakil Ketua), Abdul Moethalib Sangadji dan R. Simoen (Sekretaris), Syekh Mohammad Aboed Alamoedi (Bendahara). Hasil rapat yang diadakan di Madrasah Tarbiyatul Aitam, Surabaya ini membuahkan pembentukan suatu organisasi pertama di Hindia Timur yang tujuannya fokus untuk menegakkan kembali Khilafah. Para hadirin dari berbagai perwakilan organisasi Islam dan beberapa paguyuban daerah sepakat menamai organisasi fusi ini sebagai *Centraal Comite Chilaafat Hindia Timoer*. Koran *Soeara Perdamaian* memuat khittah atau pedoman gerakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 114-115.
- Abdul Qadim Zallum, *Malapetaka Runtuhnya Khilafah*, (Bogor: al-Azhar Press, 2011), 189
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 83.
- Bandera Islam*, 11 Desember 1924 dan 15 Januari 1925.
- Bandera Islam*, 2 April 1925.
- bandungbergerak.com*
- Darmo Kondo*, "Kalief Diindarkan", 8 Maret 1924
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, "De Afschaffing van het Khalifaat", 5 Maret 1924.
- Kemadjoean Hindia*, 22 Agustus 1924. Maret 1924.
- Sin Po Wekelyksche-Editie*, "Kalifaat boekan boeat Turkije sadja", 22
- Sipatahoenan*, "Al-Islam Congres", 16 Desember 1924.
- Soeara Perdamaian*, 9-16 September 1926
- Sri Djojobojo*, "Pergerakan Chilaafat di Hindia Timoer", 20 Oktober 1924.
- Sin Po wekelyksche editie*, 8 Maret 1924
- Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 99-114.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik* (Bangil: al-Izzah, 1997), 39